

TABEL III. 2

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016

SKPD : BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja/Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)				Catatan Penting			Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Sesuai Prioritas Daerah ke	Sesuai Sasaran Daerah Ke	Kriteria Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif						
												8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1	20																
1	20	1	20	03	26												
1	20	1	20	03	26	01	Kegiatan Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan	Terwujudnya kepastian hukum dan tegaknya supremasi hukum	Kabupaten Lima Puluh Kota	Terlaksananya Koordinasi penyelesaian permasalahan hukum	371	APBD	1	2	Sesuai Renstra	Terlaksananya Koordinasi penyelesaian permasalahan hukum 100%	445
1	20	1	20	03	26	02	Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya produk hukum daerah (Perbup dan Keputusan Bupati)	Kabupaten Lima Puluh Kota	Tersedianya Produk Hukum Daerah (Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati) yang merupakan penjabaran Kebijakan Pemerintah Daerah	381	APBD	1	2	Sesuai Renstra	Tersedianya Produk Hukum Daerah (Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati) yang merupakan penjabaran Kebijakan Pemerintah Daerah 100%	457
1	20	1	20	03	26	03	Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Peraturan Daerah dan Penyusunan Rencana Legislasi Daerah	Kabupaten Lima Puluh Kota	Tersedianya kebijakan Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan	234	APBD	1	2	Sesuai Renstra	Tersedianya kebijakan Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan 100%	281
1	20	1	20	03	26	04	Kegiatan Fasilitas Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terwujudnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat dan aparat pemerintah terhadap Peraturan Per Undang- Undangan.	Kabupaten Lima Puluh Kota	Meningkatnya pemahaman masyarakat dan aparat terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Tingkat Daerah	222	APBD	1	2	Sesuai Renstra	Meningkatnya pemahaman masyarakat dan aparat terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Tingkat Daerah 100%	268
1	20	1	20	04	27	05	Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya dan terpublikasinya Peraturan-Undang-Undangan, baik UU, PP, Permendagri, Peraturan Daerah dll kepada aparat dan masyarakat	Kabupaten Lima Puluh Kota	Tertatanya Peraturan Perundang-undangan Tingkat Pusat, Provinsi dan Daerah	232	APBD	1	2	Sesuai Renstra	Tertatanya Peraturan Perundang-undangan Tingkat Pusat, Provinsi dan Daerah 100%	278
1	20	1	20	05	28	17	Kegiatan Evaluasi dan Pengawasan Produk Hukum Nagari	Meningkatnya kualitas produk hukum Nagari sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat	Kabupaten Lima Puluh Kota	Terlaksananya penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	194	APBD	1	2	Sesuai Renstra	Terlaksananya penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 100%	233
1	20	1	20	06	28	18	Kegiatan Diseminasi Aksi Nasional Hak Azasi Manusia.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memperhatikan HAM	Kabupaten Lima Puluh Kota	Terselenggaranya urusan Pemerintahan Daerah yang sesuai dengan Hak Azasi Manusia	100	APBD	1	2	Sesuai Renstra	Terselenggaranya urusan Pemerintahan Daerah yang sesuai dengan Hak Azasi Manusia 100%	120

KEPALA BAGIAN HUKUM

ERI FORTUNA,SH

NIP. 19660104 199103 1 006

47

38,8

20